

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur keuangannya sendiri. Kewenangan yang besar tersebut disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Dana harus dikelola dengan baik dalam mendukung tujuan yang ingin dicapai. Untuk melihat seberapa baik dan benarnya pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan. Hal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah.

Otonomi daerah pada bidang Pemerintahan selalu diikuti dengan otonomi di bidang keuangan atau desentralisasi fiskal, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan daerahnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah daerah merupakan alat utama untuk melaksanakan pembangunan daerah, dimana untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan tersebut tercermin dari alokasi besarnya pendapatan dan belanja daerah. Jika alokasi Pendapatannya daerahnya besar maka secara otomatis alokasi pembiayaan pembangunan dalam Belanja daerah juga menjadi besar sehingga prioritas pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Otonomi daerah menekan adanya peranan serta kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan juga pengelolaan keuangan daerah yang diupayakan semakin membaik. Perlunya pemerintah daerah mengubah komposisi belanja yang sebelumnya didominasi untuk penggunaan belanja rutin yang relative kurang produktif, tetapi mengalokasikan belanja yang mengacu kepada pendanaan atas pengadaan pelayanan umum kepada masyarakat di berbagai

sektor, dengan semakin meningkatnya belanja maka akan di butuhkan dana yang besar agar belanja untuk pemerintah dapat terpenuhi (Sorongan, 2013) dalam (Fatimah, 2020). Otonomi daerah diberikan kepada seluruh wilayah di Indonesia, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan oleh pemerintah pusat mempunyai wewenang menyerahkan sebagian kekuasaannya ke daerah berdasarkan hak otonomi daerah dalam rangka desantrelisasi.

Belanja daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah, di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2004:182) dalam penelitian Fathiyah, dkk (2021). Dan dalam menilai Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan

cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah harus mampu mengontrol pengeluaran daerah dengan meningkatkan efisiensi pengeluaran dan menghemat anggaran. Seperti daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia, Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk salah satu Kabupaten yang berpartisipasi dalam melaksanakan otonomi daerah dengan lokasi daerahnya berada di Provinsi Riau. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi objek penelitian yang cukup menarik, karena Kabupaten Kepulauan Meranti senantiasa melakukan peningkatan terhadap aparatur daerahnya. Latar belakang pemerintah dalam penyelenggaraan APBD adalah karena dibutuhkannya alat ukur dalam penilaian kerja pemerintah suatu daerah dalam aspek keuangan. Aspek keuangan ini namun berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan fungsi dari APBD itu sendiri. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 ini merupakan perwujudan dari seluruh RKA-SKPD yang berdasarkan pada sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya disepakati dengan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sehingga APBD Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati menambahkan bahwa Pokok-pokok Kebijakan Keuangan Daerah ini merupakan penjarangan Aspirasi masyarakat yang tertampung pada APBD Tahun 2022 serta hasil evaluasi kinerja dan indentifikasi permasalahan pada saat APBD Tahun Anggaran 2021. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengajukan Rancangan APBD Tahun 2022 tetap berpedoman

kepada dokumen perencanaan daerah yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan strategis pembangunan daerah dan sasaran prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan berita online dari riau.antaranews.com pada tahun 2021 Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami defisit anggaran keuangan daerah mencapai Rp200 miliar lebih. Kondisi itu semakin diperburuk dengan banyaknya hutang daerah yang harus di bayarkan kepada pihak ketiga, sementara salah satu dampak defisit keuangan daerah adalah tidak bisa di bayarkannya insentif pegawai dan gaji honorer. Dengan adanya penyesuaian upah tersebut, setidaknya mampu mengurangi beban daerah dan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju meranti maju, cerdas dan bermartabat bisa dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan pada akhir Desember 2021 masa kerja tenaga non PNS atau honorer akan ditiadakan, pada bulan Januari 2022 di lakukan perekrutan baru dengan melewati uji kompetensi, dengan alasan untuk mengurangi beban anggaran pada APBD. Dari 3.987 yang mengikuti seleksi, sebanyak 1.062 orang dinyatakan gagal yang lolos sekitar 2.385 orang. Soal pembayaran gaji tenaga non PNS tetap di bayar sesuai yang di anggarkan sampai kontraknya berakhir Desember 2022. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga menetapkan capaian target untuk belanja, baik yang berkaitan dengan kabupaten atau proyek dan aktivitas dalam rangka membangun tanggungjawab rencana belanja dan menjelaskan efisiensi pengguna anggaran, belanja, serta pertumbuhan pengeluaran dibandingkan dengan hasil yang dicapai selama periode tertentu di bandingkan periode berikutnya.

Penelitian tentang analisis belanja daerah telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun masih terdapat beberapa perbedaan hasil dalam penelitiannya. Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan disini sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya hanya saja yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah lokasi tempat penelitian dan tahun penelitian yang berbeda. Dan disini penulis melakukan penelitian tentang analisis belanja daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengelolaan anggaran belanja daerah. Agar mampu secara baik, lancar, dan efisien dalam mengelola belanja daerah maka

pemerintah daerah perlu mengukur kinerja fiskalnya untuk mengetahui seberapa ekonomis, efisien, dan efektif mereka dapat membelanjakan uang publiknya.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019-2021.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Analisis Rasio Varians Belanja pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2021?
2. Bagaimana Analisis Rasio Belanja Operasi pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2021?
3. Bagaimana Analisis Rasio Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2021?
4. Bagaimana Analisis Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2021?
5. Bagaimana Analisis Rasio Efisiensi Belanja pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019-2021?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah agar penelitian lebih terfokus, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup permasalahan penelitian ini adalah analisis Belanja Daerah terkait rasio varians belanja, rasio keserasian belanja, dan efisiensi belanja pada pemerintahan kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Tahun anggaran yang digunakan 2019-2021

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis seberapa besar Rasio Varians Belanja pada Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Untuk menganalisis seberapa besar Rasio Belanja Operasipada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Untuk menganalisis Analisis Rasio Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti
4. Untuk menganalisis Analisis Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti
5. Untuk menganalisis seberapa besar Rasio Efisiensi Belanja pada Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan mafaat, diantaranya:

1.5.1 Secara Teoritis

1. Bagi penulis
Menambah pengetahuan dan wawasan penulis berkaitan dengan Analisis Belanja Daerah yang berkaitan dengan rasio varians belanja, rasio keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan penulis diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan mengenai belanja serta bisa memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam mempraktikkan teori yang telah dipelajari pada waktu kuliah.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi tambahan guna pada penelitian selanjutnya, dan dapat menjadi referensi dalam pengembangan pada penelitian selanjutnya mengenai analisis belanja daerah.

1.5.2 Secara Praktis

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris mengenai analisis belanja daerah serta dapat dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.
2. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan serta tambahan referensi mengenai analisis belanja daerah Program Studi sarjana terapan Akuntansi Keuangan Publik dan juga mahasiswa lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, dan landasan teori.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, metode analisis data, jenis penelitian serta defenisi konsep dan operasional.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil peneliti dan saran